Pentingnya Perencanaan Akuntabilitas Publik Terhadap Pengelolaan Anggaran Dan Keuangan

Terakhir Diperbaharui Jumat, 30 Oktober 2009

Hana Hasanah Fadel Muhammad
Anggota DPD-RI dari Provinsi Gorontalo;
Wakil Ketua Bidang Perencanaan Akuntabilitas Publik (PAP) pada KOmite IV DPD-RI

FUNGSI PERENCANAAN

Fungsi sistem perencanaan adalah melakukan antisipasi perkembangan kedepan serta memberikan alternatif langkah yang harus ditempuh guna mencapai kondisi yang diharapkan atau pun untuk mencegah perkembangan yang tidak diinginkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat bangsa.

Perencanaan sebagai bagian dari fungsi manajemen pemerintahan, apabila dapat memenuhi persyaratan bagi dan dapat membuktikan bahwa kehadiran dan kiprahnya dapat lebih memantapkan terselenggaranya manajemen pemerintahan yang baik (Good Governance), tentunya masih sangat diperlukan dan legitimate. Demikian pula halnya dengan lembaga-lembaga perencanaan baik pada tingkat pusat, Provinsi maupun Kabupaten Kota, keberadaannya masih diperlukan untuk mewadahi berbagai kegiatan perencanaan pembangunan dalam berbagai sektor, lembaga, dan kawasan yang perlu dilakukan secara sistematis, terkoordinasi dan berkesinambungan. Sebagai bagian dari sistem manajemen pemerintahan yang di tuntut public untuk menunjukkan akuntabilitasnya.

Perencanaan pembangunan harus senantiasa mengindahkan dan dapat membuktikan kreadibilitasnya dalam membumikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sementara itu, dalam suasan yang sering dihinggapi ketidakpastian perkembangan internal dan eksternal dewasa ini, apakah akibat perubahan pola hubungan kelembagaan dan kewenangan desentralisasi dalam kehidupan nasional ataupun karena fluktuasi perkembangan ekonomi dan keauangan dalam perekonomian internasional yang juga mempengaruhi aktivitas lokal, fungsi perencanaan adalah memberikan gambaran obyektif mengenai perkembangan yang terjadi ataupun mungkin terjadi dan tawaran langkah-langkah yang lebih pasti kearah pemantapan pemulihan ekonomi dan terselenggaranya kembali pembangunan bangsa di seluruh sektor, kawasan dan wilayah negara.

Sistem perencanaan pembangunan menurut Mustopadidjaja dalam tulisannya tentang Sistem Perencanaan Keserasian Kebijakan dan Dinamika Pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam mengembangkan berbagai langkah kebijakan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat bangsa, dan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa dalam bernegara, baik di pusat maupun di daerah-derah, perlu memperhatikan antara lain prinsip-prinsip berikut.

Pertama, demokrasi dan pemberdayaan. Hidupnya demokrasi dalam suatu negara bangsa, dicerminkan oleh adanya pengakuan dan penghormatan negara atas hak dan kewajiban warga negara, termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan mengekspresikan diri secara rasional sebagai wujud rasa tanggung jawabnya dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan bangsa. Dalam pada itu, aparatur pemerintah dalam mengemban tugas pembangunan, tidak harus berupaya melakukan tugas sendiri, tetapi mengarahkan ("steering rather than rowing"), atau memilih kombinasi yang optimal antara steering dan rowing apabila langkah tersebut merupakan cara terbaik untuk mencapai kesejahteraan sosial yang maksimal. Yang jelas sesuatu yang sudah bisa dilakukan oleh masyarakat, jangan dilakukan oleh pemerintah. Apabila masyarakat atau sebagian dari mereka belum mampu atau tidak berdaya, maka harus dimampukan atau diberdayakan (empowered). Pemberdayaan berarti pula memberi peran kepada masyarakat lapisan bawah didalam keikutsertaannya dalam berbagai kegiatan pembangunan.

Dalam rangka memberdayakan masyarakat dalam memikul tanggung jawab pembangunan, peran pemerintah dapat di tingkatkan antara lain melalui (a) Pengurangan hambatan dan kendala-kendala bagi kreativitas dan partisipasi masyarakat, (b) perluasan akses pelayanan untuk menunjang berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan (c) pengembangan program untuk lebih meningkatkan kemampuan dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berperan aktif dalam memanfaatkan dan mendayagunakan sumber daya produktif yang tersedia sehingga memiliki nilai tambah tinggi guna meningkatkan kesejahteraan mereka.